

## DAMPAK DAN IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI

Andi Hartati  
Universitas Tompotika

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak dan implementasi bantuan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai. Penentuan daerah sampel dilakukan Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan *Metode One-Stage Cluster Sampling* yang merupakan teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil atau membagi populasi menjadi kelompok atau kluster. Beberapa kluster kemudian dipilih sebagai wakil dari populasi yaitu Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamatan Luwuk dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis bantuan pemerintah yang diterima. Kemudian seluruh elemen dalam kluster terpilih dijadikan sebagai sampel penelitian. Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan gambaran umum mengenai dampak dan implementasi bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat kabupaten banggai dengan menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA). Pengukuran faktor dilakukan membandingkan antara harapan dan kinerja pelaksanaan bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai. Metode ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi dampak (*impact evaluation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai diperoleh hasil bahwa bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat 99 persen tepat jumlah, 99 persen guna namun 18, 87 persen tidak tepat sasaran, 25, 31 persen tidak tepat waktu. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 17 nilai Sig (2-tailed) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan perbulan sebelum menerima bantuan pemerintah dengan pendapatan perbulan setelah menerima bantuan pemerintah. Dari hasil perhitungan *uji t* dapat dilihat bahwa harga  $t = |20,586|$  dengan tingkat signifikansi 0,00. Harga  $t$  pada tabel alpha 0,05 (df 301) adalah 1,967 Dengan demikian  $t$  hitung  $20,586 > t$  tabel 1,967 dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan pemerintah berdampak pada pendapatan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Implementasi bantuan pemerintah, Pemberdayaan masyarakat*

### PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan

sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang

semakin meningkat pula. Proses natural tersebut dapat dilaksanakan jika asumsi–asumsi pembangunan yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi masyarakat secara penuh. Setiap orang memiliki kemampuan yang sama dan masing–masing pelaku bertindak rasional dapat dipenuhi.

Apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan serta memerlukan intervensi pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang lebih baik untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (*owner*) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat.

Pembangunan erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, di mana pada pembangunan diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta

mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005: 111).

Pemberdayaan masyarakat memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan manusia yang beragam di mana satu sama lain akan saling melengkapi. Ini bertujuan untuk mendorong masyarakat utamanya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kondisi kekurangan yang mereka hadapi. Untuk itu, keterlibatannya harus diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan.

Pembangunan secara konseptual mengandung makna proses di mana usaha-usaha dari masyarakat terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sebagai penyelenggara pemerintahan wilayah administrasi Kabupaten Banggai telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program kegiatan untuk mempercepat proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Program-

program tersebut berupa pemberian bantuan kepada masyarakat baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Berbagai program bantuan yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai diharapkan pemanfaatannya dapat tercapai secara optimal sehingga memberi dampak yang positif bagi proses pembangunan di wilayah Kabupaten Banggai. Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan suatu identifikasi terhadap implementasi program bantuan yang telah terealisasi serta dampaknya bagi pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui sejauh mana dampak bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai; 2) untuk mengetahui bagaimana implementasi bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai; dan 3) untuk mengetahui bagaimana harapan dan kinerja pelaksanaan bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai.

## TEORI

### Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat mengelola sumber daya yang

ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2002). Terjadinya pembangunan di suatu negara atau daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya secara bertanggung jawab. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh komponen atau daerah secara merata (Arsyad, 2002).

### Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Hikmat, 2006). Pembangunan tidak lagi berpusat

pada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Mandiri berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya (baik secara individu ataupun kolektif) melalui usaha yang dilakukan dan tidak bergantung pada yang lain. Jaringan kerja merupakan kerangka kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yaitu pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sehingga pembangunan tidak merugikan pihak manapun dan dapat memberikan hasil yang merata yang merupakan konsep keadilan (kesejahteraan yang merata).

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43). Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*" menurut Chambers (Mubyarto ; 2001). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*) yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki "*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*" (Kartasasmita, 1997).

### **Indikator Pemberdayaan**

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004) antara lain mencakup sebagai berikut.

- a. Kebebasan mobilitas
- b. Kemampuan membeli komoditas "kecil"
- c. Kemampuan membeli komoditas 'besar'

- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
- e. Kebebasan relatif dan dominasi keluarga
- f. Kesadaran hukum dan politik
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

### **Dampak dan Implementasi Bantuan Pemerintah**

Dampak adalah perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa program (Suryahadi, 2007). Salah satu metode yang digunakan dalam mengukur evaluasi dampak ini, adalah Selisih-dalamselisih/ Selisih ganda (*Difference-in-difference/Double difference*).

Dalam metode ini dimintakan data awal kelompok penerima bantuan dan kelompok bukan penerima manfaat sebelum adanya bantuan pemerintah data setelah adanya bantuan pemerintah. Kemudian untuk masing-masing kelompok, nilai data setelah intervensi bantuan dikurangi dengan data awal sebelum intervensi bantuan. Setelah itu kurangkan kedua selisih (ini asal istilah selisih-dalam-selisih). Nilai yang didapat merupakan perkiraan dampak program (Suryahadi, 2007).

Menurut Janvri (2004), untuk mengukur dampak bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan indikator berikut.

- a. Pendapatan
- b. Keamanan
- c. Keseimbangan
- d. Kesehatan
- e. Pendidikan
- f. Keberlanjutan
- g. Status Sosial dan Hak

Implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan atau mengoperasikan sebuah program baik itu yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, masyarakat, maupun pemerintah sendiri.

### **METODE PENELITIAN Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 1) Teknik dokumentasi, dilakukan dengan mengambil data sekunder yang telah dikompilasi dan dipublikasi oleh dinas-dinas terkait. Data sekunder yang dikumpulkan berkaitan

dengan bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banggai. Data tersebut antara lain berupa peraturan standar atau petunjuk teknis yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah, kebijakan wilayah baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional dan data statistik yang dapat mengungkapkan dampak bantuan pemerintah terhadap masyarakat di daerah; 2) Teknik wawancara, teknik ini dilakukan wawancara mendalam sehingga akan terkumpul data primer yang relevan sebagai bahan kajian. Data primer juga diperoleh melalui diskusi-diskusi dan wawancara mendalam dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat di Kabupaten Banggai; 3) Penyebaran kuesioner dilakukan pada tingkat rumah tangga dimana responden adalah kepala rumah tangga yang menerima program bantuan dan kepala rumah tangga yang tidak menerima bantuan (proses *nettingout*).

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan *Metode One-Stage Cluster Sampling* yang merupakan teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil atau membagi populasi menjadi kelompok atau kluster. Beberapa kluster kemudian dipilih sebagai wakil dari populasi yaitu

Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamatan Luwuk dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis bantuan pemerintah yang diterima. Kemudian seluruh elemen dalam kluster terpilih dijadikan sebagai sampel penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan gambaran umum mengenai dampak dan implementasi bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat kabupaten banggai dengan menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA). Pengukuran faktor dilakukan membandingkan antara harapan dan kinerja pelaksanaan bantaan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai. Metode ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi dampak (*impact evaluation*). Yaitu menghitung perubahan tingkat pendapatan penerima bantuan pemerintah (kelompok aksi) sebelum intervensi bantuan pemerintah dan setelah adanya intervensi bantuan pemerintah (*impact*). Untuk mengetahui bahwa dampak yang ada ditimbulkan dari kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan proses *nettingout* dengan membentuk kelompok kontrol yaitu rumah tangga dengan karakteristik yang

sama namun tidak mendapat intervensi bantuan pemerintah.

### Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan *Uji Independent Sample T Test* untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan/nyata pendapatan perbulan setelah menerima bantuan pemerintah antara kelompok aksi dan kelompok kontrol. Serta *Uji Paired Sampel T Test* untuk menguji apakah ada perbedaan yang nyata antara pendapatan perbulan sebelum dan sesudah menerima bantuan pemerintah pada kelompok aksi (penerima bantuan). Selanjutnya untuk mengevaluasi kinerja bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat digunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) dengan membuat Grafik IPA dibagi menjadi empat kuadran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Dampak Bantuan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi dampak bantuan pemerintah terhadap masyarakat dilakukan dengan mengukur indikator sebelum dan setelah diterimanya bantuan pemerintah oleh masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat dampak dalam penelitian ini adalah pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

### Pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menerima bantuan pemerintah pada kelompok aksi sebanyak 189 responden atau 62,58% memiliki tingkat pendapatan antara Rp500.000 – Rp750.000 sedangkan pada kelompok kontrol sebanyak 45 responden atau 86,54% memiliki tingkat pendapatan sebesar kurang dari Rp500.000,-.

Setelah menerima bantuan pemerintah, terjadi perubahan jumlah dan tingkat pendapatan responden kelompok aksi maupun kelompok kontrol. Jumlah responden terbanyak pada kelompok aksi setelah menerima bantuan pemerintah yaitu sebesar 47,02% atau 142 responden dengan tingkat pendapatan antara Rp750.000-Rp1.000.000,- per bulan. Setelah kelompok aksi menerima bantuan pemerintah terjadi perubahan tingkat pendapatan dan jumlah pada kelompok kontrol. Jumlah responden terbesar yaitu sebanyak 71,15% atau sebanyak 37 orang memiliki tingkat pendapatan kurang dari Rp500.000,-, sebanyak 13 orang atau 25% memiliki pendapatan antara Rp..000, - Rp750.000,- dan sebanyak 2 orang atau 3,85 % memiliki pendapatan antara Rp750.000 – Rp1.000.000,-

*Uji Independent Sample T Test* digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan/nyata pendapatan

perbulan setelah menerima bantuan pemerintah antara kelompok aksi dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 17 nilai Sig (2-tailed) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan perbulan setelah menerima bantuan pemerintah antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol.

Hal ini berarti bahwa setelah menerima bantuan pemerintah terjadi perbedaan yang signifikan antara pendapatan kelompok aksi yang merupakan penerima bantuan pemerintah dengan pendapatan kelompok kontrol yang tidak menerima bantuan pemerintah.

### **Kesehatan**

Penilaian masyarakat terhadap kesehatan yaitu memperhatikan pola hidup sehat sebelum menerima bantuan pemerintah yang terbesar adalah cukup memperhatikan yaitu sebanyak 287 responden atau 95%, diikuti dengan persepsi pilihan memperhatikan sebanyak 15 responden atau 5%.

Setelah menerima bantuan pemerintah penilaian masyarakat terhadap kesehatan menjadi berubah yaitu sebanyak 37 responden atau 12% memilih sangat memperhatikan pola hidup sehat, 240 responden atau 79% memilih memperhatikan dan 25 responden atau 8%

memilih cukup memperhatikan. Setelah menerima bantuan pemerintah ternyata membuat sebagian besar masyarakat menjadi lebih memperhatikan pola hidup sehat untuk memperbaiki tingkat kesehatan keluarga mereka.

### **Pendidikan**

Sebelum menerima bantuan pemerintah, pendidikan tertinggi dalam keluarga responden adalah SMP dengan jumlah 160 responden atau 53%, diikuti tingkat pendidikan SD sebanyak 66 responden atau 22% dan tingkat SMA ke atas sebanyak 52 responden atau 17% serta yang tidak sekolah sebanyak 24 responden atau 8%.

Setelah menerima bantuan pemerintah, tingkat pendidikan tertinggi dalam keluarga adalah SMA ke atas sebanyak 162 responden atau 54% diikuti tingkat pendidikan SMP sebanyak 113 responden atau 54%, tingkat pendidikan SD sebanyak 22 responden atau 7% serta yang tidak sekolah sebanyak 5 responden atau 2%.

### **Implementasi Bantuan Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Tepat Sasaran**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pemerintah sebanyak 76,49% sudah tepat sasaran sesuai kriteria, sedangkan 18,87% tidak tepat sasaran

sesuai kriteria. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan masyarakat penerima bantuan pemerintah bahwa bantuan pemerintah yang diberikan sudah tepat sasaran, misalnya petani menerima bantuan bibit jahe, dan bibit pertanian lainnya sedangkan peternak juga diberikan bantuan bibit ternak sapi dan kambing. Demikian juga halnya dengan jenis bantuan pemerintah lainnya yang diberikan seperti alat perbengkelan kepada masyarakat yang memiliki usaha bengkel dan juga alat lainnya.

### **Tepat Jumlah**

Bantuan pemerintah yang diberikan sebanyak 80,8 % sudah tepat jumlah sesuai kebutuhan dan sebanyak 4,64 % bantuan pemerintah tidak tepat sesuai jumlah yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan masyarakat penerima bantuan umumnya mereka mengatakan bahwa bantuan pemerintah sudah tepat sesuai dengan jumlah kebutuhan. Namun, masih ada juga responden yang menjawab netral sebanyak 14,57 %.

### **Tepat Guna**

Bantuan pemerintah sebanyak 86,1 % tepat guna karena dapat meningkatkan produksi usaha penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan masyarakat penerima bantuan

pemerintah seperti benih padi dan ternak serta alat bengkel sebagian besar dapat meningkatkan produksi sehingga membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka.

### **Tepat waktu**

Persepsi responden atas bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat 66,89% tepat waktu dan 23,51% tidak tepat waktu. Bantuan pemerintah dinilai tepat waktu karena bantuan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khusus petani selama musim tanam berlangsung, dan untuk usaha lainnya.

Berdasarkan hasil analisis data, bahwa dampak bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat dengan melihat indikator pendapatan mengakibatkan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga penerima bantuan sebesar 45% dan peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat bukan penerima bantuan sebesar 27%. Setelah adanya bantuan pemerintah, rata-rata pendapatan per bulan masyarakat penerima bantuan meningkat 18% lebih besar daripada rata-rata pendapatan per bulan rumah tangga bukan penerima bantuan.

Sehingga dengan menggunakan Uji *Independent Sample T Test* dan Uji *Paired Sampel T Test* disimpulkan bahwa bantuan

pemerintah secara signifikan berdampak pada pendapatan masyarakat. Melihat dampak bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat dengan indikator kesehatan diperoleh hasil bahwa 99 persen rumah tangga penerima bantuan pemerintah setelah menerima bantuan cenderung lebih memperhatikan pola hidup sehat. Demikian pula dengan indikator pendidikan bahwa tingkat pendidikan tertinggi dalam keluarga masyarakat penerima bantuan sebesar 54 persen berada di tingkat SMA ke atas.

Melalui penelitian ini, implementasi bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai diperoleh hasil bahwa bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat 99 persen tepat jumlah, 99 persen guna namun 18,87 persen tidak tepat sasaran, 25,31 persen tidak tepat waktu. Dengan menggunakan Metode *Importance Performance Analysis* (IPA) diperoleh hasil bahwa harapan dan kinerja pelaksanaan bantuan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banggai berada pada Kuadran B yaitu Pertahankan Kinerja memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh responden dan atribut-atribut yang dianggap oleh responden sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasan relatifnya lebih tinggi dengan indikator

yang dinilai masyarakat sudah optimal pelaksanaannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana diungkapkan pada bab pendahuluan serta hasil dari proses olah data, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan program bantuan pemerintah kepada masyarakat telah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari:
  - 1.1 pendapatan
    - a. Terjadi perubahan tingkat pendapatan masyarakat penerima bantuan pemerintah (kelompok aksi) dan masyarakat yang tidak menerima bantuan pemerintah (kelompok kontrol).
    - b. Masyarakat penerima bantuan pemerintah (kelompok aksi) meningkat rata-rata pendapatannya lebih besar 18 persen dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat bukan penerima bantuan (kelompok kontrol).
    - c. Terdapat perbedaan yang signifikan setelah intervensi bantuan pemerintah antara pendapatan kelompok aksi yang merupakan penerima bantuan

- pemerintah dengan pendapatan kelompok kontrol yang tidak menerima bantuan pemerintah.
- d. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan perbulan sebelum menerima bantuan pemerintah dengan pendapatan perbulan setelah menerima bantuan pemerintah.
  - e. Bantuan pemerintah berdampak terhadap pendapatan masyarakat.
  - f. Masyarakat lebih memperhatikan pola hidup sehat setelah
  - g. menerima bantuan pemerintah karena akibat adanya peningkatan
  - h. tingkat pendapatan masyarakat.
  - i. Tingkat pendidikan tertinggi dalam keluarga mengalami
  - j. peningkatan dikarenakan adanya peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan pemerintah.

### 1.2 Implementasi

- a. Bantuan pemerintah 76,49 % sudah tepat diberikan kepada masyarakat pengguna sedangkan, 18,87 % tidak tepat sasaran sesuai kriteria.
- b. Jumlah bantuan pemerintah yang diberikan kepada

masyarakat sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan produksi usahanya baik petani, nelayan, peternak dan usaha lainnya.

- c. Penggunaan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan produksi usahanya.
- d. Bantuan pemerintah yang diberikan sesuai dengan masa atau waktu usaha produksi masyarakat penerima bantuan.

### 1.3 Harapan dan Kinerja Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Berdasarkan kuadran IPA, dimana tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan responden penerima bantuan pemerintah dapat dikelompokkan dalam kuadran B yaitu pertahankan kinerja. Hal ini menunjukkan unsur pokok atau indikator yang sudah ada sehingga wajib dipertahankan karena dianggap sangat penting dan memuaskan masyarakat penerima bantuan. Pada kuadran B memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh responden dan atribut-atribut yang dianggap oleh responden sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga

tingkat kepuasan relatifnya lebih tinggi.

### Saran

- a. Agar pemberian bantuan atau stimulan dari pemerintah kepada masyarakat dapat tepat sasaran maka perencanaannya didasarkan pada data identifikasi potensi desa dan keadaan keluarga tidak mampu atau keluarga miskin.
- b. Agar pemberian bantuan pemerintah dari pemerintah kepada masyarakat lebih berdayaguna dan berhasilguna diperlukan adanya evaluasi atau penilaian akhir terhadap kemanfaatan (aspek manfaat) bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.
- c. Agar hasil evaluasi bantuan kepada masyarakat dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan guna keberlangsungan programprogram bantuan kepada masyarakat di desa.

### DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin. 2002. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.

Mubyarto.2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta : BPFY.

Hikmat, Hary, 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Ite.

J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternativesvision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.Pendum PNPMMandiri.

M. E. J. Newman and M. Girvan. 2004. *Finding and evaluating community structure in networks*, Phys. Rev. E 69, 026113

Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W., 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.

Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta

Suparjan, Hempri Suyatna (2003), *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai*

Suryahadi, A, D. Suryadarma dan A. Sumarto (2006), *Economic Growth and Poverty Reduction in Indonesia: The Effect of Location and Pectoral Components of Growth*, SMERU Working Paper.

Wrihatnolo, R.R. dan Dwidjowijoto, R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Elex Media Computindo



Jurnal  
Ideas  
Publishing

P-ISSN 2442-367X